SKRIPSI

PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA PENITI LUAR KECAMATAN JONGKAT KABUPATEN MEMPAWAH

Program Studi Administrasi Publik

Kajian Manajemen Publik

Oleh:

DESY MAULANI

E1012221018

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA PENITI LUAR KECAMATAN JONGKAT KABUPATEN MEMPAWAH

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Kajian Manajemen Publik

Oleh:

Desy Maulani
E1012221018

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA PENITI LUAR KECAMATAN JONGKAT KABUPATEN MEMPAWAH

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Desy Maulani
NIM E1012221018

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Tanggal 5-6-2026

Drs. Asmadi, M.Si.
NIP 196202041988101001

Pembimbing Pendamping

Tanggal 2/6/2026

Deni Darmawan, SE, M.Si,
NIP 197306092007011001

Disahkan Oleh:
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

LEMBAR PENGESAHAAN

PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI DESA PENITI LUAR KECAMATAN JONGKAT KABUPATEN MEMPAWAH

oleh:
Desy Maulani
NIM. E1012221018

Dipertahankan di : Di Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Senin, 06 juli 2026
Waktu : 13.00 - Selesai
Tempat : Ruang Seminar Fisip Untan

Tim Penguji

Ketua

Drs. Asmadi, M.Si.
NIP 196202041988101001

Sekretaris

Deni Darmawan, SE, M.Si,
NIP 197306092007011001

Penguji Utama

Prof. Dr. Rusdiono, M.Si,
NIP196403171988101001

Penguji Pendamping

Dr. Roma Tressa, M.Si
NIP 198107232024212005

Disahkan Oleh:
Dekan Fisip Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan instrumen kebijakan pelayanan publik dasar dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengentaskan Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis Pengelolaan Program Pemerintah dalam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Peniti Luar, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, ditinjau dari empat fungsi manajemen menurut George Robert Terry, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi bersama informan dari pihak Balai Pelaksana, Koordinator Kabupaten, Tim Teknis, Tenaga Fasilitator Lapangan, aparatur desa, serta masyarakat penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program di Desa Peniti Luar belum terlaksana secara optimal. Pada fungsi perencanaan, objektivitas terganggu oleh dominasi usulan jalur aspirasi politik legislatif tanpa verifikasi data riil desa oleh balai pelaksana. Pada fungsi pengorganisasian dan pelaksanaan, pembagian kerja formal lumpuh karena pendampingan pemberkasan diambil alih aktor informal di luar struktur resmi, serta kurangnya koordinasi yang memicu ketidakseimbangan beban kerja fasilitator. Pada fungsi pengendalian, pengawasan internal sangat lemah karena petugas jarang mengevaluasi fisik ke lapangan, sehingga ditemukan rumah bantuan yang tidak memenuhi standar teknis layak huni seperti ketiadaan jendela, ventilasi, dan fasilitas sanitasi memadai. Penelitian ini merekomendasikan penguatan fungsi manajemen melalui validasi data mandiri yang transparan, pengawasan fisik berkala yang ketat, serta penegakan sanksi administrasi terhadap penyimpangan standar bangunan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Manajemen Publik, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Rumah Tidak Layak Huni.

ABSTRACT

Desy Maulani *(E1012221018): Management of the Self-Reliance Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) in Peniti Luar Village, Jongkat Sub-district, Mempawah Regency. Undergraduate Thesis. Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences. Tanjungpura University Pontianak 2026.*

The Self-Reliance Housing Stimulant Assistance Program is a basic public service policy instrument from the Ministry of Housing and Settlement Areas to alleviate Uninhabitable Houses for Low-Income people. This research aimed to analyze the Management of the Government Program in the Self-Reliance Housing Stimulant Assistance in Peniti Luar Village, Jongkat Sub-district, Mempawah Regency, reviewed from four management functions according to George Robert Terry, namely planning, organizing, actuating, and controlling functions. The research method used was descriptive qualitative. Data were collected using interviews, observation, and documentation. The informants were the Implementing Agency, Regency Coordinator, Technical Team, Field Facilitator, village apparatus, and beneficiary communities. The results show that the program management in Peniti Luar Village has not been implemented optimally. In the planning function, objectivity was disrupted by the dominance of proposals from political legislative aspiration channels without real village data verification by the implementing agency. In the organizing and actuating functions, the formal division of work was paralyzed because documentation assistance was taken over by informal actors outside the official structure, as well as a lack of coordination that triggered an imbalance in the facilitator's workload. In the controlling function, internal supervision was very weak because officers rarely conducted physical evaluations in the field, so it was found that assisted houses did not meet technical standards for habitability, such as the absence of windows, ventilation, and adequate sanitation facilities. This research recommended strengthening management functions through transparent independent data validation, strict periodic physical supervision, and enforcement of administrative sanctions against deviations from building standards.

Keywords*: Management, Public Management, Self-Reliance Housing Stimulant Assistance, Uninhabitable Houses.*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Peniti Luar Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah". Latar belakang penelitian ini berakar pada pentingnya pemenuhan hak atas rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) demi mengentaskan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Kabupaten Mempawah sendiri menghadapi tantangan besar dengan keberadaan 5.483 unit RTLH pada tahun 2025, di mana Kecamatan Jongkat menjadi wilayah dengan persentase RTLH tertinggi. Di balik masalah tersebut, terdapat sebuah paradoks menarik di Desa Peniti Luar yang menjadi lokus penelitian; desa ini sebenarnya memiliki persentase RTLH paling sedikit di Kecamatan Jongkat, sehingga secara teoretis pengelolaannya seharusnya bisa lebih fokus dan optimal, namun pada kenyataannya implementasi di lapangan dinilai belum berjalan efektif. Kondisi tersebut memicu lahirnya rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana pengelolaan program pemerintah dalam BSPS di Desa Peniti Luar Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah sudah terlaksana secara efektif. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis efektivitas pengelolaan program ditinjau dari fungsi manajemen, sekaligus mengidentifikasi hambatan operasional yang terjadi. Sementara itu, manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoretis untuk memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai manajemen program pemerintah, serta manfaat praktis sebagai bahan masukan, evaluasi, dan rekomendasi bagi instansi penyelenggara agar penyaluran bantuan di masa depan lebih tepat sasaran.

Untuk membedah permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pisau analisis teori manajemen George R. Terry yang berfokus pada fungsi *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengendalian). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, serta dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai subjek penelitian yang kompeten, mulai dari Staf BP3KP Kalimantan I, Koordinator Kabupaten (Korkab), Tim Teknis Kabupaten, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), aparatur Desa Peniti Luar, hingga masyarakat penerima manfaat. Keabsahan data dalam riset kualitatif ini dijamin melalui penerapan teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu.

Berdasarkan analisis data, temuan atau hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan program BSPS di Desa Peniti Luar belum terlaksana secara optimal akibat kendala sistematis pada keempat fungsi manajemennya. Pada fungsi perencanaan (*planning*), ditemukan distorsi objektivitas karena daftar usulan didominasi oleh jalur aspirasi politik legislatif, di mana pihak Balai P3KP Kalimantan I bertindak pasif dengan langsung menerima daftar usulan tersebut tanpa melakukan pemeriksaan silang terhadap basis data RTLH riil milik desa. Akibatnya, sosialisasi program menjadi bersifat tertutup dan terbatas hanya bagi warga yang namanya masuk dalam daftar usulan jalur politik tersebut. Pada fungsi pengorganisasian (*organizing*), terjadi kelumpuhan pembagian kerja formal di tingkat bawah karena proses pendampingan berkas administrasi warga diambil alih oleh oknum tim lapangan informal, yang

menyebabkan tugas pokok dan fungsi dari TFL resmi menjadi tidak berfungsi. Masalah ini merembet pada fungsi pelaksanaan (*actuating*), di mana koordinasi dan pengarahan lapangan terhambat lantaran Korkab jarang memantau ke lapangan akibat ketidakseimbangan beban kerja, sementara pihak Balai tidak memberikan instruksi operasional yang jelas kepada Tim Teknis Kabupaten, sehingga memicu sikap apatis dari Tim Teknis untuk ikut membantu pengawasan fisik. Terakhir, fungsi pengendalian (*controlling*) menjadi titik paling lemah karena mekanisme monitoring internal berjalan sangat longgar; petugas pengawas jarang turun ke lapangan untuk mengevaluasi fisik secara ketat dan cenderung meloloskan verifikasi administrasi demi mengejar laporan progres. Dampaknya, ditemukan beberapa rumah bantuan yang dibangun di bawah standar teknis layak huni seperti tidak memiliki jendela, ventilasi, dan fasilitas sanitasi yang memadai karena pola pikir warga yang penting asal rumah jadi.

ebagai akhir penelitian, diusulkan beberapa saran strategis untuk perbaikan program ke depan. Pertama, Balai P3KP Kalimantan I wajib memperkuat perencanaan lewat validasi data mandiri yang transparan agar bantuan tepat sasaran dan bebas intervensi politik. Kedua, pengelola program harus mengaktifkan kembali peran instruksional dan koordinasi formal dengan melibatkan Tim Teknis Kabupaten secara aktif. Ketiga, fungsi kontrol perlu diperketat melalui monitoring fisik berkala langsung ke lapangan oleh TFL dan Korkab, bukan sekadar memeriksa berkas. Keempat, perlu penegakan sanksi administratif yang tegas terhadap penyimpangan standar teknis bangunan, yang dibarengi edukasi intensif mengenai kriteria rumah sehat kepada masyarakat.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Desy Maulani

Nomor Induk Mahasiswa : E1012221018

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul "Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Peniti Luar Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah" ini merupakan hasil kerja saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya, pendapat yang pernah ditulis, serta diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 06 juli 2026
Yang Membuat Pernyataan



Desy Maulani
NIM E1012221018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."

(QS. An-Najm: 39)

"Hidup bukan untuk saling mendahului, bayangan yang diciptakan oleh mentari, ada karena matahari bermaksud terpuji, untukmu cintai diri sendiri hari ini."

(Baskara-Hindia)

"Sainganmu bukan orang lain, sainganmu adalah kemalasan, ego, dan kurang disiplinmu sendiri. Bersainglah melawan itu dan menangkan dirimu sendiri, maka hidup akan mengikutimu."

(Warren Buffett)

Tiada lembar yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar peersembahan, berikut penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terkasih dan tersayang yaitu:

1. Kepada kedua surgaku tercinta yaitu ibu Murni dan bapak Muhammad yang telah melahirkan dan membesarkanku, terima kasih atas segala pengorbanan besar yang telah kalian dedikasikan kepada ku, terima kasih untuk setiap pengorbanan tenaga, pikiran, kekuatan, kesabaran dan doa-doa yang selalu di panjatkan untuk ku. Terima kasih karena sudah memperjuangkan dan memberikan semangat serta motivasi sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan dengan sangat baik.
2. Kepada abang tercinta dan tersayangku, terima kasih untuk setiap hal-hal yang telah kau berikan kepada ku untuk menjaga, menyayangi, membimbing,

memberikan semangat dan motivasi, serta selalu mengkahwatirkan ku. Terima kasih untuk setiap doa-doa sehingga skripsi ini dapat selesai dengan sangat baik.

3. Kepada nenek sorah dan datok hamsah terima kasih untuk setiap dukungan, semangat, motivasi dan doa-doa yang telah kalian berikan kepada ku.

4. Kepada sahabatku (Yuni, Pale, Chelsi, dan Yuli) terima kasih yang selalu memberikan sopport, mendukung, merangkul, membersamai dan menghibur serta memberikan motivasi terhadap penulis.

5. Keluarga besar terima kasih atas doa yang terus mengalir dan dukungan yang selalu diberikan.

6. Kepada Almamater tercinta Universitas Tanjungpura.

Terakhir penulis persembahkan untuk diri sendiri, Desy Maulani. Terimakasih karena telah menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena selalu berusaha keras untuk menyelesaikan pendidikan sarjana-1 ini, terima kasih karena tidak pernah menyerah dan selalu senantiasa menikmati setiap prosesnya walaupun dibilang tidak mudah. Terimakasih karena telah mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan untuk berhenti. Apapun proses penyusunan skripsi ini kamu sudah menyelesaikannya dengan baik dan maksimal, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggkaan untuk diri sendiri dan saya ingin mengucapkan permintaan maaf kepada diri saya sendiri karena tidak dapat memberikan hasil yang baik untuk hasil akhir. Setelah ini mari bekerja lebih keras lagi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkah dan rahma-Nya yang diberikan, sehingga penulis dapat menulis usulan penelitian yang berjudul "Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Peniti Luar Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah" dapat diselesaikan dalam proses penulisan ini dibuat dengan maksimal mungkin, sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki dan bantuan dari beberapa referensi. Dari penulisan usulan penulisan ini, penulis banyak mendapatkan arahan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Ira Patriani, S.IP, M. Si., Selaku Ketua Jurusan Administrasi Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku koordinator Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Drs. Asmadi, M.Si. selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing sekaligus memberikan arahan dan masukan selama proses penulisan skripsi. Semoga setiap urusan bapak selalu dimudahkan karna selalu memudahkan setiap urusan mahasiswa.
5. Deni Darmawan, SE, M.Si, selaku pembimbing pendamping yang telah memberikan waktu untuk setiap bimbingan sekaligus memberikan arahan dan

masukan selama proses penulisa skripsi. Semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT, dan juga dipermudah setiap urusannya sebagaimana bapak mempermudah setiap urusan orang lain terutama mahasiswa bimbingan bapak.

6. Prof. Dr. Rusdiono, M.Si, selaku dosen penguji utama yang telah memberikan masukkan dan saran yang membangun guna kesempurnaandalam skripsi ini Semoga Alah SWT selalu melindungi setiap langkah dan usaha Bapak.
7. Dr. Roma Tressa, M.Si sebagai dosen penguji kedua yang telah banyak memberikan masukkan dan saran yang membangun guna kesempurnaan dalam skripsi ini. Semoga Tuhan selalu memebrkati setiap langkah, dan usaha Bapak.
8. Dr. Dedi Kusnadi, M.Si Selaku dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Wakil dekan, Bapak/Ibu Dosen, Staf Jurusan Ilmu Administrasi, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Pontianak, 06 Juli 2026



Desy Maulani
E1012221018

DAFTAR ISI

halaman

COVER ..... **i**
COVER DALAM ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN ..... **iii**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
ABSTRACK ..... **vi**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **vii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **x**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xiv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR TABEL ..... **xix**
DAFTAR GAMBAR ..... **xx**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 13
1.3 Fokus Penelitian 13
1.4 Rumusan Masalah 13
1.5 Tujuan Penelitian 14
1.6 Manfaat Penelitian 14
1.6.1 Manfaat Teoritis 14
1.6.2 Manfaat Praktis 14
BAB II KAJIAN PUSTAKA **15**
2.1 Definisi Konsep 15
2.1.1 Manajemen 15
2.1.2 Manajemen Administrasi 17

2.2 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 17
2.2.1 Penyelenggara BSPS 19
2.3 Teori 25
2.4 Hasil Penelitian Yang Relevan 28
2.5 Kerangka Pikir 31
2.6 Pertanyaan Penelitian 33
BAB III METODE PENELITIAN 34
3.1 Jenis Penelitian 34
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 35
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 37
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 38
3.4.1 Subjek 38
3.4.2 Objek 39
3.5 Teknik Pengumpulan Data 39
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 41
3.7 Analisis Data 42
3.7.1 Keabsahan Data 43
3.7.2 Teknik Analisis Data 44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 46
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Jongkat 46
4.1.1. Letak Wilayah 46
4.1.2. Kondisi Demografis 48
4.2. Gambaran Umum Desa Peniti Luar 49
4.2.1. Kondisi Geografis 49
4.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Peniti Luar 51
4.2.3 Kondisi Sosial dan Budaya 51
4.3. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahandan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan I 57
4.3.1. Tugas dan Fungsi Balai P3KP Kalimantan I 60
4.3.2. Kerangka Kelembagaan 61

4.3.3. Dasar Hukum 63

4.3.4. Bagan Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Perumahan (BP3KP) Kalimantan I 63

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 66

5.1 Deskripsi Hasil Penelitian 66

5.2 Pembahasan 67

5.2.1. *Planning* (Perencanaan) 67

5.2.2. *Organizing* (Pengorganisasian) 78

5.2.3 *Actuating* (pelaksanaan*)* 87

5.2.4 *Controlling* (Pengendalian) 95

BAB VI PENUTUP 110

6.1. Kesimpulan 110

6.1.1. *Planning* (Perencanaan) 110

6.1.2. *Organizing* (Pengorganisasian) 110

6.1.3. *Actuating* (Pelaksanaan) 111

6.1.4. *Controlling* (Pengendalian) 111

6.2. Saran 112

6.3 Keterbatasan Penelitian 113

DAFTAR PUSTAKA 113

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kondisi Rumah Kabupaten Mempawah 5
Tabel 1.2 Jumlah Rumah Kecamatan Jongkat.....6
Tabel 1.3 Kuota Penerima dan Alokasi Anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Mempawah 9
Tabel 2.1 Penelitian Relevan 28
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....36
Tabel 4.1 Nama-Nama Perangkat Desa dan Jabatan 49
Tabel 5.1 Daftar Penerima BSPS Desa Peniti Luar Tahun 2025 66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Rumah Program BSPS 11
Gambar 2.1 Tahapan Penyelengaraan BSPS 20
Gambar 2.2 Kerangka Pikir 31
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Jongkat 45
Gambar 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 46
Gambar 4.3 Peta Wilayah Desa Peniti Luar 47
Gambar 4.4 Kantor Desa Peniti Luar 48
Gambar 4.5 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan I 57
Gambar 4.6 Bagan Organisasi Balai P3KP Kalimantan I 61
Gambar 5.1 Petunjuk Teknis Penyelenggaraan 67
Gambar 5.2 Sosialisasi Pertai Gerindra dalam Program BSPS 82
Gambar 5.3 Struktur Pengorganisasian Penyelenggara Program BSPS 89
Gambar 5.4 Rumah-Rumah Yang Mencapai Target Tahap II 94
Gambar 5.5 Kartu Kendali Kualitas Rumah 95
Gambar 5.7 Rumah Yang Belum Memenuhi Standar 101

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi 117
Lampiran 2 Pedoman Wawancara 118
Lampiran 3 Pedoman Dokumentasi 126
Lampiran 4 Surat Tugas Penelitian 128
Lampiran 5 Biodata Penulis 129

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai upaya nyata dalam memenuhi kebutuhan hunian yang aman dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menyelenggarakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Sejahtera yang berlandaskan secara yuridis pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah yang layak, sehat, dan aman, serta mendorong kemandirian dan gotong royong dalam merenovasi atau membangun huniannya secara mandiri.

Dalam Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2022 serta dijabarkan secara teknis dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan Nomor 14/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya. Regulasi tersebut memuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terstruktur ke dalam lima tahapan utama, meliputi persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, hingga pemanfaatan. Setiap tahapan memiliki prosedur spesifik mulai dari verifikasi sasaran, pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB), hingga pengawasan mutu yang pematuhannya menjadi kunci utama keberhasilan intervensi program di lapangan.

Dalam pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mekanisme pengusulan kegiatan meliputi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Kementerian/Lembaga,

Bupati/Walikota, serta Gubernur DKI Jakarta. Surat usulan yang ditujukan kepada Menteri Direktur Jenderal Perumahan tersebut wajib memuat komponen substansial seperti jenis kegiatan, detail lokasi, jumlah unit, nama pengusul, serta daftar calon penerima bantuan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)/PUPR juga menyediakan jalur reguler melalui aplikasi SIBARU (Sistem Informasi Bantuan Perumahan) untuk melakukan pendataan dan verifikasi kelayakan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara objektif berbasis digital. Adanya kombinasi jalur reguler (SIBARU) dan jalur aspirasi ini menuntut fungsi perencanaan (*planning*) di tingkat desa agar mampu mensinkronkan seluruh data usulan guna meminimalisasi bias sasaran dan memastikan bantuan tepat sasaran.

Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memberikan anggaran sebesar Rp20.000.000,00 per unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dana stimulan tersebut dialokasikan secara spesifik ke dalam dua pos pemanfaatan utama, yaitu sebesar Rp2.500.000,00 dialokasikan untuk upah kerja tukang dan sebesar Rp17.500.000,00 diprioritaskan untuk pemenuhan indikator standar Rumah Layak Huni (RLH), yang mencakup penguatan komponen struktur bangunan seperti pondasi, kolom, dan rangka atap demi keselamatan bangunan. Selain itu, dana tersebut juga mencakup perbaikan komponen non-struktur dan sanitasi meliputi atap, dinding, lantai, kecukupan pencahayaan, penghawaan, dan ketersediaan jamban yang sehat.

Persyaratan penerima bantuan BSPS mewajibkan calon penerima merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga. Calon

penerima bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan tingkat pendapatan maksimal setara dengan UMK/UMP yang berlaku di daerah setempat, memiliki tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas serta sah, menempati satu-satunya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan belum pernah memperoleh bantuan perumahan dari pemerintah. Terakhir, calon penerima bantuan wajib bersedia dan berkomitmen untuk mengikuti seluruh ketentuan pelaksanaan program secara gotong royong dan berswadaya.

Dalam perspektif administrasi publik, pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin bukanlah sekadar persoalan teknis konstruksi atau estetika bangunan, melainkan representasi dari fungsi pelayanan publik yang bersifat dasar. Sebagai salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, penyediaan hunian yang layak merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjalankan wewenangnya. Namun, transformasi kebijakan sosial ini menjadi manfaat nyata sangat bergantung pada kualitas manajemen publik yang diterapkan.

Manajemen publik dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berfungsi sebagai penggerak dalam mengelola sumber daya daerah, mengoordinasikan antar-lembaga, dan memastikan bahwa urusan pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh substansi pemberdayaan (Pasolong, 2021). Oleh karena itu, efektivitas pencapaian standar rumah layak huni di lapangan menjadi cerminan dari sejauh mana fungsi-fungsi manajemen dijalankan untuk menjamin tanggungjawab dan ketepatan sasaran pelayanan kepada masyarakat.

BSPS merupakan bantuan yang disediakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat penerima bantuan agar bersama-sama dengan masyarakat penerima bantuan lainnya melakukan gotong royong dalam membenahi tempat tinggal mereka, dengan dukungan dari masyarakat sekitar. Partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk bahu-membahu juga perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan program ini, dikarenakan alokasi agenda kegiatan ini juga berperan dalam keberhasilan dan kemakmuran masyarakat itu sendiri (Farida 2020).

Program ini harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin kepada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya (Mardikanto & Soebiato, 2017). Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan harus di dasarkan pada penentuan garis kemiskinan yang tepat dan pada pemahaman yang jelas mengenai sebab-sebab timbulnya persoalan itu.

Dalam pelaksanaan pembangunan rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), masyarakat penerima bantuan diwajibkan untuk berpartisipasi secara aktif melalui swadaya. Hal ini disebabkan karena bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah adalah berupa dana tunai yang bersifat stimulan, sehingga keberhasilan pembangunan rumah sangat bergantung pada kontribusi dan inisiatif masyarakat itu sendiri. Adapun hunian yang dibangun harus memenuhi standar rumah layak huni, yang mencakup aspek kecukupan luas,

kualitas struktur bangunan, dan kondisi kesehatan lingkungan.

Beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat telah melaksanakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai salah satu upaya Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Mempawah merupakan salah satu kabupaten yang memiliki 5.699 rumah tidak layak huni pada tahun 2025, dan mendapatkan penanganan bantuan rumah 216 sehingga tersisa 5.438 rumah tidak layak huni.

Tabel 1.1
Jumlah Kondisi Rumah Kabupaten Mempawah 2025

NO	KECAMATAN	RTLH 2025 (Unit)	PENANGANAN RTLH TAHUN 2025 (Unit)	RUMAH LAYAK HUNI 2026 (Unit)	RTLH 2026 (Unit)	Persentase Rumah Tangga Layak Huni Tahun 2025
1	Sui Kunyit	166	21	6.178	145	97,707
2	Mempawah Hilir	1.020	66	9.330	954	90,723
3	Mempawah Timur	464	-	7.005	464	93,788
4	Sui Pinyuh	782	15	12.366	767	94,160
5	Segedong	435	65	4.898	370	92,976
6	Jongkat	1.180	27	8.866	1.153	88,492
7	Anjongan	264	2	4.072	262	93,955
8	Toho	917	10	3.985	907	81,460
9	Sadaniang	471	10	1.724	461	78,902
	JUMLAH TOTAL	**5.699**	**216**	**58.424**	**5.483**	**91,420**

Sumber : Dinas Perkimtan, 2025

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa Kabupaten Mempawah memiliki 5.483 unit rumah yang memiliki status rumah tidak layak huni. Angka yang cukup besar ini menunjukkan bahwa tantangan pemenuhan hunian layak bagi masyarakat di Kabupaten Mempawah masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah daerah maupun pusat. Banyaknya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) tersebut menuntut adanya tata kelola dan manajemen program penanggulangan yang ekstra efektif, efisien, serta objektif agar setiap bantuan yang diturunkan benar-benar menyasar pada warga yang paling membutuhkan.

Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Mempawah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk bantuan dari pemerintah, tetapi juga sebagai stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu berdaya dan berpartisipasi aktif dalam memperbaiki kondisi rumahnya. Program ini diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat dalam mewujudkan perumahan yang layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.

Kecamatan Jongkat merupakan salah satu dari 9 kecamatan di Kabupaten Mempawah yang memiliki persentase paling tinggi terhadap rumah tidak layak huni. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk menyelenggarakan program perbaikan rumah layak huni dalam program BSPS. Berdasarkan data sebaran rumah di Kabupaten Mempawah tahun 2025, Kecamatan Jongkat juga termasuk salah satu kecamatan dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, jumlah total rumah di Kecamatan Jongkat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total hunian di Kabupaten Mempawah.

Tabel 1.2
Tabel Jumlah Rumah Kecamtan Jongkat 2025

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	DUSUN	KK (DINAS KESEHATAN)	KK (DINAS CAPIL)	RUMAH LAYAK HUNI	RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	JUMLAH RUMAH
1	JONGKAT	JUNGKAT	10	2.906	2.906	2.602	304	2.906
2	JONGKAT	PENITI LUAR	3	771	771	617	154	771
3	JONGKAT	SEI NIPAH	2	934	934	747	187	934
4	JONGKAT	WAJOK HILIR	7	2.550	2.550	2.305	221	2.526
5	JONGKAT	WAJOK HULU	2	3.248	3.248	2.821	282	3.103
	SUB TOTAL		24	10.409	10.409	9.092	1.148	10.240

Sumber : Dinas Perkimtan, 2025

Meskipun Kecamatan Jongkat berada di wilayah yang strategis, data perbandingan menunjukkan masih adanya rumah yang terkategori tidak layak huni.

Hal ini mengindikasikan bahwa Kecamatan Jongkat tetap memerlukan perhatian serius dalam pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Adanya rumah tidak layak huni di Kecamatan Jongkat menuntut pengelolaan yang ketat agar bantuan stimulan dapat benar-benar meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah tersebut.

Namun, tahapan penyelenggara program BSPS ini harus sesuai dengan kebijakan dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa harus menggunakan tata kelola administrasi yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penguatan fungsi manajemen publik. Pengelolaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan serangkaian proses pengelolaan yang bertumpu pada perencanaan (*planning*) yang akurat sebagai langkah mencegah dan pengawasan (*controlling*) yang ketat sebagai langkah memperbaiki (Terry dan Rue, 2019).

Pada saat dilakukan perencanaan, keberhasilan program sangat bergantung pada ketepatan identifikasi sasaran yang memerlukan koordinasi solid antara Koordinator Kabupaten (Korkab), Desa Peniti Luar, dan Tenaga fasilitator. Masalah administrasi seringkali muncul pada tahap ini ketika kapasitas aparatur desa dalam menyusun perencanaan dan verifikasi data tidak memadai, sehingga masyarakat yang seharusnya di ikutsertakan dalan pendataan sama sekali tidak terdata.

Dalam perspektif manajemen publik, sebenarnya telah menetapkan rangka kerja yang jelas bagi pelaksanaan fungsi perencanaan (*planning*) dan pengawasan

(*controlling*) (Terry dan Rue, 2019). Pada dimensi perencanaan, juknis yang digunakan balai P3KP Kalimantan I tersebut memandatkan Tim Teknis dan Kepala Desa untuk melakukan verifikasi usulan serta validasi administrasi calon penerima guna menjamin ketepatan sasaran. Proses perencanaan ini merupakan fase krusial karena kegagalan dalam mengidentifikasi penerima manfaat yang tepat akan berdampak pada inefisiensi alokasi anggaran daerah.

Sementara itu, fungsi pengawasan (*controlling*) juga tertuang secara tegas dalam tugas Koordinator Kabuapten (Korkab) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk melakukan pemantauan, evaluasi, hingga pembinaan masyarakat selama proses pembangunan fisik rumah. Secara regulatif, tim ini dibentuk untuk memastikan bahwa setiap unit rumah yang diperbaiki di desa peniti luar benar-benar memenuhi standar layak huni yang mencakup keselamatan bangunan, luas bangunan dan kesehatan penghuni.

Kabupaten Mempawah dipilih menjadi salah satu lokasi fokus dalam upaya meminimalkan keberadaan rumah tidak layak huni. Seberapa besar ruang lingkup program ini di tingkat daerah dapat dicermati dari pembagian kuota penerima dan pagu anggaran yang disediyakan. Guna memberikan pemahaman yang utuh mengenai cakupan program tersebut, berikut dilampirkan data kuota penerima manfaat serta alokasi dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Mempawah:

Tabel 1.3
Kuota Penerima dan Alokasi Anggaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Mempawah 2024/2025

	No	Kecamatan	Desa	Penerima	Anggaran
2024	1	Anjongan	Dema	21	420.000.000,00
			Kepayang	22	440.000.000,00
	2	Jongkat	Jungkat	10	200.000.000,00
			Peniti Luar	16	320.000.000,00
			Sui. Nipah	10	200.000.000,00
			Wajok Hilir	42	840.000.000,00
			Wajok Hulu	75	1.500.000.000,00
	3	Segedong	Perit Bugis	11	220.000.000,00
			Sui. Burung	11	220.000.000,00
			Sui. Purun Besar	12	240.000.000,00
	4	Sui. Kunyit	Sui. Duri II	26	520.000.000,00
	5	Sui. Pinyuh	Peniraman	25	500.000.000,00
			Sui. Bakau Besar Darat	50	1.000.000.000,00
	Total				6.620.000.000,00

	No	Kecamatan	Desa	Penerima	Anggaran
2025	1	Jongkat	Peniti Luar	10	200.000.000,00
			Wajok Hulu	24	480.000.000,00
	2	Mempawah Hilir	Malikian	25	500.000.000,00
			Pasir	16	320.000.000,00
			Sengkubang	19	380.000.000,00
	3	Segedong	Peniti Dalam I	20	400.000.000,00
			Peniti Dalam II	42	840.000.000,00
	4	Sungai Kunyit	Semparong Prt. Raden	20	400.000.000,00
	5	Sungai Pinyuh	Galang	10	200.000.000,00
	Total				3.720.000.000,00

Sumber: Dokumen Balai P3KP Kalimantan I, 2026

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, secara umum dapat dilihat bahwa perencanaan alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Mempawah menyasar sebaran wilayah yang cukup luas dengan dukungan anggaran negara yang tergolong besar. Sebagai bagian dari perencanaan makro tersebut, Desa

Peniti Luar di Kecamatan Jongkat turut ditetapkan sebagai salah satu wilayah lokus penerima manfaat program, yang idealnya didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan fisik hunian masyarakat miskin setempat.

Dalam paparan penelitian terdahulu, masih disimpulkan bahwa kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) belum efektif di berbagai daerah di Indonesia. Meski program ini dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah layak huni, pelaksanaannya seringkali menemui berbagai kendala yang mengakibatkan tujuan program tidak tercapai secara optimal. Ketidakefektifan ini mencakup distribusi, ketercapaian hasil, keswadayaan, dan keberlanjutan program (Ripwanto & Ansoriyah, 2024).

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Peniti Luar terlihat bahwa proses pendataan calon penerima bantuan berjalan tidak objektif, akibat kurangnya sinkronisasi data. Pihak Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3KP) Kalimantan I ditemukan hanya memverifikasi daftar warga dari jalur usulan aspirasi pemangku kepentingan tanpa melakukan pemeriksaan silang terhadap keseluruhan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik desa. Akibatnya, verifikasi lapangan hanya berfokus pada nama-nama yang diusulkan tersebut, sehingga mengabaikan warga lain.

Ketidakoptimalan ini berlanjut pada pengorganisasian terkait kejelasan peran aktor formal. Struktur organisasi program mengalami disfungsi di tingkat bawah karena proses penyiapan berkas administrasi warga diambil alih oleh oknum tim lapangan informal, alih-alih dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

resmi. Dominasi aktor informal ini membuat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TFL tidak terlaksana. Kegagalan manajemen organisasi dalam mengontrol batasan kerja ini membuat keberadaan TFL resmi sebagai pendamping netral menjadi tidak berfungsi secara optimal.

Pada tahap pelaksanaan terjadi hambatan serius dalam aspek pengarahan dan koordinasi. Koordinator Kabupaten (Korkab) jarang turun ke lapangan karena beban kerja yang tidak sebanding dengan kapasitas personel. Untuk mengatasi keterbatasan ini, pihak Balai seharusnya menggerakkan Tim Teknis Kabupaten untuk membantu pengawasan. Namun kenyataannya, pihak Balai tidak memberikan instruksi operasional yang jelas kepada Tim Teknis Kabupaten. Ketiadaan arahan formal ini memicu sikap apatis dari Tim Teknis, sehingga mereka tidak mengambil peran dalam pengawasan fisik pembangunan di Desa Peniti Luar.

Gambar 1.1
Rumah Program BSPS



Sumber : Dokumentasi Peneliti 2026

Terakhir, kelemahan mendasar ditemukan pada tahap pengendalian yang berdampak pada rendahnya mutu luaran program. Lemahnya monitoring membuat kepatuhan terhadap standar teknis sangat longgar. Sebagaimana ditunjukkan pada

Gambar 1.1, ditemukan rumah bantuan yang belum selesai dan tidak memenuhi syarat layak huni (dinding belum rapi, tidak ada jendela, minim ventilasi, dan tanpa sanitasi). Ketika pembangunan fisik mengabaikan standar kesehatan namun pengawas tetap meloloskan verifikasi administrasi demi mengejar laporan progres, hal ini membiarkan pola pikir masyarakat yang *"asal rumah jadi"* tanpa memedulikan aspek kelayakan huni.

Berbagai fenomena di atas menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antara regulasi yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan Nomor 14/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya. Secara kebijakan, program BSPS dirancang sebagai instrumen pelayanan publik yang presisi untuk menjamin hunian layak, namun pada praktiknya, program ini belum berjalan secara optimal di Desa Peniti Luar. Oleh karena itu, berbagai persoalan yang saling berkaitan ini menegaskan bahwa pengelolaan program BSPS di Desa Peniti Luar belum terlaksana dengan baik.

Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan yang sudah terarah tidak menjamin keberhasilan program tanpa dibarengi dengan manajemen publik yang kuat. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian untuk membedah lebih dalam sejauh mana fungsi-fungsi manajemen telah dijalankan untuk menutup celah antara idealisme kebijakan dan realitas di lapangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Peniti Luar Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah yang ada, yaitu:

1. Pihak Balai hanya memverifikasi daftar nama yang diusulkan oleh anggota Dewan tanpa memeriksa seluruh data RTLH yang ada di Desa Peniti Luar.
2. Pihak Balai membiarkan pengurusan administrasi warga diambil alih oleh aktor informal di luar struktur resmi program.
3. Kurangnya pengarahan dan instruksi kerja dari pihak Balai kepada Tim Teknis Kabupaten.
4. Korkab dan TFL tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh dan koreksi di lapangan.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan bantuan sosial berupa rumah layak huni yang diberikan pemerintah di sebuah desa yang ada di Kabupaten Mempawah, maka fokus penelitian ini terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dalam Pengelolaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terkhususnya di Desa Peniti Luar Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan, maka penulis menarik perumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pengelolaan Program Pemerintah Dalam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Peniti Luar Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah sudah terlaksana secara efektif?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan Program Pemerintah Dalam Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Peniti Luar Kecamtan Jongkat Kabupaten Mempawah.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan jumlah penelitian studi yang bermanfaat tentang kemajuan ilmu administrasi publik, khususnya tentang kajian manajemen publik dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dan inisiatif pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah: Memberikan sumbangsih berupa bahan pertimbangan mengenai program yang akan di ambil kedepannya semua bisa menjadikan acuan dalam pengelolaan program kedepannya.
b. Bagi Mahasiswa: Diharapkan pengetahuan dan wawasan kepada para mahasiswa mengenai pengelolaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang sebelumnya bisa lebih baik lagi.
c. Bagi Masyarakat: Sebagai bahan bacaan sehingga diharapkan bisa membantu pemahaman masyarakat terutama penerima manfaat mengenai Bantuan Perumahan Swadaya.